

MENGAPA KONFLIK BERULANG TERJADI DI KOTA AMBON? TINJAUAN DEMOGRAFI DAN KEAMANAN ATAS KONFLIK HORIZONTAL PERKOTAAN*

Poltak Partogi Nainggolan**

Abstract

Riots in Ambon often recurred within short intervals since the last 2001 protracted horizontal conflict. Many attempted to partially analyze these phenomena by focusing only the trigger of the riots such as individual crimes and bad police behavior, ignoring to discuss the cause of the conflicts from their roots, namely the demographic factors, such as population growth and its density and interactions. Early data collection of this research was conducted in Jakarta and local libraries and central statistic bureau. Its analysis uses a qualitative method, and its research report was made based on an analytical-descriptive direction. This research reveals that the current structure of Ambonese population, segregation, and development malfunction create a sufficient condition for re-emergence of new social conflict in the city. The cause of these are the absence of the city government's interventions with its policies in controlling and restructuring the population growth and eliminating both the long-existed segregation and the development malfunction. Applying a combination of security studies and urban sociology approaches becomes relevance, and also, fruitful in this research.

Keywords: Demographic Security, Urban Conflicts, Horizontal Conflicts, Religious Conflicts, Ambon

* Penelitian yang dilakukan pada tahun 2011. Penulis menyampaikan terima kasih kepada Dr. Ganewati Wuryandari, MA dari LIPI yang telah memberikan kritik, koreksi, dan berbagai masukan lainnya untuk tulisan ini.

** Peneliti utama di Pusat Pengkajian dan Pelayanan Data dan Informasi di Sekretariat Jenderal DPRRI, dapat dihubungi di pptogin@yahoo.com.

Abstrak

Konflik horizontal terjadi berulang-ulang di Kota Ambon dalam jeda waktu yang tidak terlalu lama, setelah konflik lama usai pada tahun 2001, satu dasawarsa lalu. Banyak pihak yang menganalisis masalah itu di ujungnya, dengan melihat faktor pemicu konflik, dan mengabaikan yang mendasar atau muaranya, yakni faktor demografis. Tulisan ini merupakan hasil penelitian yang mengungkap relevansi berulangnya konflik primordial di Kota Ambon dengan tingkat pertumbuhan dan kepadatan penduduk, serta penyebarannya. Tulisan ini juga mengungkap relevansi segregasi penduduk dan malfungsi pembangunan, yang telah menyediakan penyebab yang cukup bagi terciptanya konflik massal berulang kali di Kota Ambon, yang faktor pemicunya seringkali hanya masalah individual. Pengumpulan data dilakukan dengan kombinasi studi literatur dari sumber-sumber data resmi dan wawancara dengan aparat pemkot dan kalangan akademisi lokal. Analisis dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Tulisan hasil penelitian ini mengungkap kondisi yang cukup bagi munculnya setiap saat konflik sosial yang bersifat horizontal di Kota Ambon, akibat absennya kebijakan pemerintah pusat dan kota yang terencana untuk bisa mencegah konflik di kemudian hari. Sehingga, bersama-sama dengan malfungsi pembangunan, warga Kota Ambon dibiarkan sendiri harus mengatasi masalahnya, yang setiap saat berujung pada konflik massal.

Kata Kunci: Keamanan Demografis, Konflik Agama, Konflik Perkotaan, Konflik Horizontal, Ambon

I. Pendahuluan

Setelah bentrokan pada 23 Januari 2011 antara warga Batu Merah dan Mardika¹, pada 11 September 2011, Kota Ambon kembali dilanda kerusuhan massal, lagi-lagi antara dua kelompok penduduk yang berlatar belakang agama Kristen dan Islam, yang berimbang jumlahnya, yang sejak lama mendiami kota tersebut. Konflik horizontal (primordial) ini merupakan kerusuhan massal yang baru muncul lagi dalam era reformasi di bawah pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, setelah konflik serupa yang pecah di akhir Desember 1999 pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid. Faktor pemicunya juga mirip, sama-sama disulut oleh individu warga yang tengah menumpang kendaraan angkutan umum. Jika kasus yang sebelumnya dilatarbelakangi kematian penumpang angkutan kota (angkot), yang tidak membayar dan dikeroyok massa, maka yang terakhir ini dipicu oleh tewasnya tukang ojek yang diduga meninggal akibat kecelakaan

¹ "Kekerasan Horizontal di Indonesia," *Kompas*, 2 Desember 2011: 8.

lalu lintas, namun dicurigai telah dianiaya oleh komunitas yang berlatar belakang berbeda.² Dari sini konflik primordial merebak ke seluruh wilayah kota, bahkan wilayah Provinsi Maluku lainnya, dan berkembang menjadi konflik agama. Jika konflik horizontal sudah pecah, korban warga yang tewas dan harta benda yang lenyap akibat rumah dan bangunan yang dibakar tidak sedikit. Ini belum terhitung mereka yang dirugikan karena harus mengungsi dan tinggal di daerah perbatasan pemukiman antara penduduk yang berbeda agama.

Dalam kondisi konflik horizontal yang belum teratasi tuntas, kerusuhan massal baru pecah lagi pada 17 September 2011, akibat meluasnya berita bahwa seorang pemuda yang mengendarai motor dengan kecepatan tinggi dan suara keras telah terjatuh dan kritis akibat dilempar petugas Satuan Polisi Lalu-Lintas. Konsentrasi massa segera terjadi dan situasi kembali memanas di Kota Ambon, terutama setelah beredar isu bahwa pengendara sepeda motor itu tewas di RSUD Kudamati.³ Aparat kepolisian yang dibantu aparat TNI harus diturunkan untuk mengendalikan situasi, sehingga warga yang sudah dalam kondisi emosi dapat dicegah dari bentrokan. Warga mendapatkan penjelasan dari aparat keamanan, bahwa isu tersebut tidak benar, karena pengendara sepeda motor masih hidup dan tengah dirawat di RS. Di luar dua kasus yang terbilang besar itu, masih ada kasus-kasus bentrokan antar-warga lainnya, yang dapat mengarah pada kerusuhan massal, baik yang melibatkan penduduk Kota Ambon, ataupun yang juga terjadi di wilayah lain di Provinsi Maluku. Misalnya, pada 24 Februari 2010, telah terjadi bentrokan antar warga Desa Laha Teluk Ambon, Kota Ambon, dengan warga desa Hatu, Lihitu Barat, Maluku Tengah akibat kebun cengkeh warga Ambon yang dibakar warga Hatu. Ini belum terhitung kejadian bentrokan antara warga desa pada 9 Maret 2010 di Tual.⁴

Sementara, masih pada tahun ini, 2012, tercatat beberapa konflik horizontal yang terjadi, baik yang mengulang konflik sebelumnya ataupun yang berlangsung di wilayah yang baru, seperti di Kabupaten Maluku Tengah pada 11 Februari dan 7 Maret 2012.⁵ Kemudian, pada 14 Mei 2012, konflik horizontal yang

² Wawancara dengan Kombes Nasan Hutahaen, Direktur Intelkam, Harianto Kabag Analisa Direktorat Intelkam, dan perwira intel Direktorat Intelkam Polda Maluku pada 20 September 2011 di Ambon; Wawancara dengan Kol. Nazaruddin, Danrem 151/Binaiya, Provinsi Maluku pada 23 September 2011 di Ambon. Lihat pula "Pemkot Minta Amankan Sekolah, Pasar, dan Terminal," *Suara Maluku*, 22 September 2011: 12.

³ Wawancara dengan Kombes Nasan Hutahaen, Direktur Intelkam, Harianto Kabag Analisa Direktorat Intelkam, dan perwira intel Direktorat Intelkam Polda Maluku pada 20 September 2011 di Ambon; Wawancara dengan Kol. Nazaruddin, Danrem 151/Binaiya, Provinsi Maluku pada 23 September 2011 di Ambon. Lihat juga, "Pemuda Dianiaya, Kota Ambon Memanas," *Papua Barat Pos*, 19 Nopmeber 2011: 7.

⁴ "Kekerasan Horizontal di Indonesia," *Kompas*, 2 Desember 2011, *loc.cit.*

⁵ "Ambon kembali membara, darah kembali tumpah di Desa Pelauw," *arrahmah.com*, 11 Pebruari 2012, diakses pada 27 Agustus 2012.

berakhir dengan kerusuhan sosial pecah kembali akibat keributan antar-warga yang terjadi ketika obor Pattimura memperingati Hari Pattimura, pahlawan kota itu, sedang diarak di bagian-bagian kota yang rawan konflik primordial, yakni Batu Merah dan Mardika.⁶ Yang lebih baru lagi, masih dalam suasana lebaran, muncul kerusuhan massal pada 20 Agustus 2012 di Kota Ternate, menyerupai konflik horizontal yang pecah pada 9 Juli 2011 lalu,⁷ tetangga Kota Ambon, yang dulu masih dalam satu provinsi, namun sama-sama padat penduduknya.⁸

Tabel 1. Frekuensi Konflik di Kota Ambon 2 Tahun Belakangan

Waktu	Kasus	Tempat
23 Januari 2011	Kasus angkutan kota (angkot)	Batu Merah
11 September 2011	Kasus ojek	Mardika
17 September 2011	Kasus kecelakaan lalu-lintas	Kudamati
14 Mei 2012	Kasus perayaan hari pahlawan	Batu Merah dan Mardika

Dari berbagai peristiwa konflik horizontal yang muncul berulang di Kota Ambon itu, lalu muncul pertanyaan, apa pelajaran berharga dari konflik komunal yang pecah kembali di Ambon pada 11 September 2011 lalu? Mengapa konflik primordial masih rentan muncul di Ambon, dan sekali terjadi mengakibatkan korban yang besar? Anehnya, negara besar dan pemerintahnya yang sering bangga dengan klaim contoh sukses (transisi) demokrasi abad ke-21, dan bahkan mendapatkan pujian pihak Barat ternyata, tampak kewalahan untuk menghentikan konflik komunal yang berulang terjadi di Ambon. Bersamaan dikirimnya tim investigasi pusat, pemerintah mengingatkan bahaya provokasi melalui SMS yang dilakukan orang-orang yang berkepentingan dengan terciptanya konflik. Di beberapa daerah, aparat kepolisian melakukan pencegahan atas mereka yang hendak ke Ambon dan menyita senjata tajam yang akan dibawa penumpang kapal.⁹ Kota Ambon pun segera penuh dengan pejabat pusat yang mencari tahu dan memberikan solusi konflik. Di kota yang sebelum perang saudara di tahun 1999 dikenal sebagai percontohan bagi kehidupan antar-agama, investigator konflik dan aparat keamanan masih sibuk

⁶ "Kerusuhan: Ambon rusuh saat peringatan Pattimura," *Bisnis.jabar.com*, 15 Mei 2012, diakses pada 27 Agustus 2012.

⁷ Wawancara dengan Mahmud Haji Umar, Dosen FH, Universitas Khairun, Ternate, Provinsi Maluku Utara, di Ternate pada tanggal 16 Juli 2011; Wawancara dengan Abdul Kadir Bubu, Dosen FH Universitas Khairun, di Ternate, Provinsi Maluku Utra, pada 16 Juli 2011; Wawancara dengan Dr. Marwan, SE, MSi, Dosen FE Universitas Khairun, Ternate, Provinsi Maluku Utara, di Ternate pada tanggal 16 Juli 2011. Wawancara dengan Salmid Janidi, Dosen FH, Universitas Khairun, Ternate, Provinsi Maluku Utara, di Ternate pada tanggal 16 Juli 2011.

⁸ "Penembakan Misterius Picu Bentrokan Susulan," *Kompas*, 8 Maret 2012: 22.

⁹ Wawancara dengan Kombes Nasan Hutahaen, Direktur Intelkam, Harianto Kabag Analisa Direktorat Intelkam, dan perwira intel Direktorat Intelkam Polda Maluku pada 20 September 2011 di Ambon.

bekerja menyibak konflik dan mencegah provokasi lebih lanjut.¹⁰ Pemerintah daerah sibuk menggalang kampanye bagi kedua pihak yang berkonflik untuk menahan diri dan mewaspadaai provokator. Namun, efektifkah itu dalam jangka panjang? Sehingga, menarik pula untuk diketahui, faktor-faktor apa saja yang turut berkontribusi bagi munculnya berulang konflik horizontal di sana, yang bisa dipicu oleh kejadian sepele apa saja seperti yang terungkap selama ini?. Penggunaan sebuah kombinasi pendekatan studi-studi keamanan dan sosiologi perkotaan, khususnya demografi, akan membantu untuk mengamati dan menganalisis fenomena yang berlangsung.

II. Metodologi Penelitian

A. Jenis Penelitian

Tulisan ini merupakan hasil penelitian deskriptis-analitis, yang mengungkap masalah mendasar di balik sering muncul atau berulangnya konflik sosial di Kota Ambon. Analisis dilakukan terhadap faktor-faktor utama yang menyebabkan berulangnya konflik horizontal atau primordial di sana, yang selama ini tidak terlalu banyak diperhatikan atau bahkan sama sekali diabaikan. Selama ini, penelitian-penelitian sebelumnya, perlu dielaborasi sedikit lebih banyak mengungkap konflik dari segi pemicunya dan melihat nuansa atau motif politik yang ada daripada berupaya mengungkap masalah demografi, kondisi kesejahteraan penduduk, lapangan kerja, dan keamanan insani (*human security*) pada umumnya).

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan dari Maret 2011 hingga akhir Oktober 2011. Penelitian lapangan (*fieldworks*) dilakukan di Kota Ambon, Provinsi Maluku, pada 19-25 September 2011. Sedangkan studi kepustakaan (*library studies*) dilakukan di Jakarta, di perpustakaan daerah dan perpustakaan universitas, serta kantor Badan Pusat Statistik Daerah di Kota Ambon.

C. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan beberapa narasumber. Para narasumber adalah para pejabat pemda dan aparat keamanan di wilayah konflik dan sekitarnya, yakni aparat dinas kota, Polda, dan dan Korem, serta akademisi universitas yang mengamati dan mengajar di wilayah konflik dan sekitarnya. Selain melalui observasi di lokasi-lokasi kejadian konflik, pengumpulan data juga dilakukan dengan

¹⁰ Wawancara dengan Kol. Nazaruddin, Danrem 151/Binaiya, Provinsi Maluku, pada 23 September 2011 di Ambon.

serangkaian wawancara informal dengan aparat keamanan yang tengah bertugas di wilayah konflik.

D. Teknik Analisis Data

Data primer dan sekunder yang diperoleh melalui penelitian lapangan dan studi kepustakaan yang telah terkumpul dari BPS dan sumber-sumber informasi perpustakaan dan universitas, bersama-sama dengan hasil wawancara mendalam, di analisis secara berama-sama. Analisis kombinasi data ini memberikan hasil yang lebih akurat dan kritis terhadap fenomena dan hipotesis yang dibuat, yakni faktor-faktor demografis, seperti tingkat pertumbuhan, penyebaran dan densitas penduduk, serta segregasi penduduk dan malfungsi (kebijakan) pembangunan menyediakan kondisi bagi terciptanya konflik horizontal yang berulang kali di Kota Ambon. Sementara, hasil pengamatan langsung (observasi) ketika konflik tengah terjadi memberi nilai tambah dalam penyusunan laporan. sehingga membuat analisis menjadi lebih empirik.

III. Kerangka Pemikiran

Dalam literatur tentang konflik komunal, terminologi konflik dilihat secara sosiologis sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih, yang bisa juga dimaknakan secara lebih luas sebagai suatu kelompok, dengan kondisi salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak (kelompok) lain dengan cara menghancurkan atau membuatnya tidak berdaya.¹¹ Melihat sejarahnya dan latar belakang penyebab konflik, begitu banyak jenis konflik yang ada.¹² Dalam hal ini, konflik horizontal merupakan konflik yang berlangsung di antara (kelompok) masyarakat, yang dapat saja dipicu atau bermula dari masalah individu anggotanya, yang kemudian meluas menjadi konflik massal. Sedangkan konflik primordial menunjuk pada konflik yang berlangsung antara dua kelompok masyarakat dengan latar belakang agama, kesukuan, ras dan sebagainya, yang berbeda. Sementara, konflik sektarian merujuk lebih jauh dan spesifik pada konflik yang sering terjadi konflik antar atau intra kelompok agama. Biasanya, konflik horizontal, konflik primordial, dan konflik sektarian dikatakan pula sebagai konflik sosial dan komunal. Hal ini karena konflik ini, melibatkan banyak orang atau bersifat masif (massal), dan berkepanjangan yang menciptakan situasi anarki total akibat kerusuhan (*riots*) yang meluas.¹³ Dengan demikian, konflik tersebut tidak berupa tawuran massal biasa yang sifatnya insidental dan kebetulan.

¹¹ Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi: Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011: 347-397.

¹² Chaider S. Bamualim et al (Eds.), *Communal Conflicts in Contemporary Indonesia*, Jakarta: UIN, KAS, 2002.

¹³ *Ibid.*

Melihat lamanya konflik berlangsung, sebuah konflik sosial yang terjadinya begitu lama, atau berlarut-larut, biasanya diidentifikasi sebagai sebuah fenomena atau representasi perjuangan berkepanjangan yang sering penuh dengan aksi-aksi kekerasan dari sebuah kelompok sosial. Tujuan dasarnya untuk memperoleh pengakuan, penerimaan, dan penghargaan oleh kelompok atau pihak lain, serta menciptakan rasa aman dan nyaman, dengan diperolehnya aksesibilitas yang adil dan sama. Ini termasuk kelembagaan politik dan ekonomi yang ditawarkan negara bagi seluruh warganya.¹⁴ Terkait ini, pemerintah dikatakan sebagai pihak yang dinilai paling bertanggung jawab sebagai institusi negara yang seharusnya dapat menyediakan kebutuhan dasar komunal. Dalam konteks ini, sebagai konsekuensinya peranannya dapat berada dalam tingkat memuaskan atau mengecewakan, atau paralel dengan ini, pemerintah juga dapat mencegah atau justru memancing tumbuhnya konflik.¹⁵

Jadi, analisis konflik kontemporer, dalam melihat asal-usul terjadinya konflik sosial, mengingatkan bahwa sebuah konflik sosial yang berlarut-larut, sumber-sumber konfliknya terletak di dalam Negara. Argumen yang ditarik dari studi empiris di banyak tempat, antara lain di Los Angeles, Birmingham, Paris, Marseille, dan London tampaknya relevan untuk melihat berulang munculnya konflik sosial, atau konflik horizontal dan primordial, di Kota Ambon. Sumber konflik dalam hal ini tidak lagi perbedaan agama, namun juga hal-hal mendasar lain, seperti kepadatan penduduk, kepemilikan rumah, lapangan pekerjaan, dan keberhasilan pembangunan yang mampu menyediakan akses yang adil dan sama bagi warganya.¹⁶

Tetapi, para pakar keamanan seperti Buzan, Terrif, dan Hoadley menilai bahwa kegiatan, interaksi antar-warga, atau mobilitas penduduk yang tinggi akan mempengaruhi dinamika interaksi antar-warga yang sudah tercipta dalam sebuah negara, apalagi kota, yang luas wilayahnya lebih kecil. Sehingga, untuk memperoleh penjelasan yang lebih memadai atas konflik horizontal, konflik primordial, dan konflik sektarian yang sering muncul di Kota Ambon, diperlukan pula alat analisis yang telah digunakan para pakar keamanan, apalagi jika memahami konflik sebagai interaksi antara berbagai pihak, sehingga merupakan suatu yang niscaya dalam (pola) hubungan sosial.¹⁷ Para ahli ini, sebelumnya telah menyibak faktor penyebab konflik dan ancaman keamanan pasca-Perang Dingin, yang bersumber

¹⁴ Andi Muh. Darlis, *Konflik Komunal: Studi dan Rekonsiliasi Konflik Poso*, Yogyakarta: Buku Litera, 2012: 7.

¹⁵ Miall, Ramsbotham & Woodhouse, dikutip Darlis, *ibid.*, 2000. Namun, untuk lebih jelas lagi, lihat Barry Buzan, *People, States and Fear: An Agenda for International Security Studies in the Post-Cold War Era*, Second Edition, Boulder CO: Lynne Rienner, 1991: 371 *et. seq.*

¹⁶ Bamualim, 2002, *loc.cit.*

¹⁷ Park dan Durgess, 1999, *ibid.*: 11.

dari faktor-faktor non-militer, seperti kelangkaan sumber daya alam, bahan makanan dan air bersih, interaksi dan mobilitas manusia lintas pulau, negara dan kontinen, serta faktor-faktor demografi lainnya. Karena itulah kemudian dikenal adanya ancaman keamanan yang nir-militer, atau yang bersifat non-tradisional (konvensional). Dalam konteks ini, kegiatan migrasi penduduk, baik terorganisasi maupun tidak, yang belakangan ini lebih dikuatirkan dan telah diidentifikasi oleh Stephen Hoadley,¹⁸ berskala nasional maupun internasional, keduanya dapat menjadi sumber konflik horizontal dalam sebuah negara dan antar-negara, dalam jangka panjang.

Analisis konflik dan keamanan belakangan ini telah melihat secara empirik pengaruh perpindahan penduduk secara perorangan, berangsur-angsur dan massal, dalam suatu negara maupun lintas-negara, baik yang diorganisasi secara resmi dan regular melalui kebijakan pemerintah, maupun tidak.¹⁹ Berbagai kebijakan, seperti transmigrasi dan pengiriman TKI, serta migrasi individual dan berkelompok, telah diidentifikasi sebagai penyebab yang rawan menimbulkan konflik horizontal, atau antar-penduduk, di suatu negara dan lintas-negara, karena memiliki dampak luas terhadap nilai-nilai yang berlaku (dominan) dan perubahan (transformasi) struktur demografi, dari yang sudah mapan menjadi baru, sehingga menimbulkan perasaan terancam, yang akan memunculkan destabilitas. Kerusuhan atau konflik Ambon dan memanasnya hubungan hingga di tingkat masyarakat antara warga Indonesia dan Malaysia terkait nasib TKI, adalah beberapa contoh yang relevan untuk itu.

Perubahan paradigma keamanan yang memberikan perhatian pada warga sebagai fokus perhatian negara, semakin berkembang luas setelah UNDP pada tahun 1994 mengintroduksi konsep keamanan manusia (*human security*), yang menilai keamanan lebih dari sekedar masalah pertahanan teritorial negara, kepentingan nasional dan isu senjata nuklir. Sejak ini, logika keamanan telah dipeluas dan harus memberikan perhatian yang mendalam atas upaya memahami sumber konflik dan pencegahannya, serta langkah-langkah penghapusan kemiskinan dan keterbelakangan. Untuk itulah, mengapa kemudian, isu-isu pertumbuhan dan kepadatan penduduk, ketersediaan bahan pokok, migrasi, kondisi pekerjaan, disparitas ekonomi, migrasi penduduk dan interaksinya memperoleh perhatian penting.²⁰

Adapun migrasi massal atau mengalirnya orang secara deras masuk ke suatu wilayah, yang berlangsung secara legal dan ilegal, dapat menimbulkan kecemasan

¹⁸ Lihat Stephen Hoadley, "Irregular Migration as a Security Issue," dalam Stephen Hoadley and Juergen Rueland (eds), *Asian Security Reassessed*, Singapore: ISEAS 2006: 251-269.

¹⁹ Lihat "Sumber (Potensi) Konflik," Darlis, *op.cit.*: 18-19.

²⁰ Barry Buzan dan Lene Hansen, *The Evolution of International Security Studies*, Cambridge: Cambridge University Press, 2009, hal. 202-205.

atau rasa ketidakamanan bagi penduduk setempat. Kegiatan yang tidak didukung kebijakan pemerintah pusat dan lokal yang kondusif, atau negara asal dan tujuan, untuk migrasi yang bersifat internasional, serta terlindungi hukum ini dalam jangka panjang dapat menjadi benih dari permasalahan kompleks menyangkut keamanan,²¹ karena akan berdampak langsung terhadap stabilitas dalam masyarakat dan negara akibat berubahnya secara signifikan struktur demografi yang ada. Migrasi massal menyebabkan meningkatnya pertumbuhan dan densitas penduduk di tempat tujuan, dan berlangsungnya kompetisi pencarian sumber daya kehidupan (pekerjaan), fasilitas sekolah, pelayanan kesehatan (rumah sakit), dan fasilitas publik lainnya secara lebih ketat.

Secara empirik terungkap bahwa di kota-kota besar yang padat seperti di Perancis, misalnya Paris dan Marseilles, dan AS, antara lain, Los Angeles dan New York, tidak hanya aksi unjuk rasa (demonstrasi) besar-besaran bermotif politik dan ekonomi, namun kerusuhan massal atau rasial, pernah terjadi. Jadi, kerusuhan massal atau rasial tidak hanya rawan pecah di kota-kota besar negara berkembang seperti Kairo dan Jakarta, tetapi juga negara maju. Kepadatan penduduk dan sempitnya atau tidak sebandingnya luas wilayah kota/kabupaten dan pemukiman penduduk yang tinggal, menjadi faktor yang merupakan penyebab utamanya.²²

Barry Buzan, pakar dan analis keamanan, sejak dini telah mengembangkan konsep keamanan yang luas, melebihi apa yang dikenal selama ini sebagai ancaman keamanan tradisional. Ia memilah masalah keamanan berdasarkan kolektifitas dan aktifitas umat manusia yang dipengaruhi paling sedikit oleh lima sektor, yakni militer, politik, ekonomi, masyarakat, dan lingkungan hidup.²³ Secara lebih spesifik, Buzan, melihat lagi keamanan masyarakat sebagai hal-hal mengenai sustainabilitas, dengan persyaratan yang dapat diterima bagi evolusi, dari pola-pola tradisional bahasa, kebudayaan dan agama, serta identitas nasional dan kebiasaan.²⁴ Melalui perspektif ini, konflik nilai (primordial dengan nuansa agama) antara penduduk Kota Ambon yang sudah tersegregasi dalam sebuah lingkungan pemukiman perkotaan yang tinggi tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduknya secara kontiniu dalam beberapa dasawasa terakhir, berusaha dianalisis.

²¹ *Ibid*:157-165.

²² Buzan, 1991, *op.cit*.

²³ *Ibid*; Terry Terrif et al, *Securities Studies Today*, Cambridge: Poity Press, 2003: 166.

²⁴ Buzan, *op.cit*, hal. 19-20, dalam Terry Terrif et al, 167.

IV. Penyebab Konflik

A. Kepadatan Penduduk

Di luar langkah hiruk-pikuk kegiatan mencari tahu siapa dalang pecahnya gelombang kekerasan baru di Ambon, tidak banyak yang berupaya menggali secara mendalam sisi laten penyebab konflik, dari perspektif keamanan non-tradisional, terutama keamanan insani. Di negara maju, analisis keamanan sejak dua dasawarsa lalu telah menelaah faktor-faktor non-tradisional sebagai penyebab ancaman keamanan. Analisis seperti Barry Buzan di awal 1990-an dan 2000-an telah intensif meriset dan mengaitkan keamanan individu, masyarakat, nasional, dan internasional, serta antara perubahan kondisi lingkungan sekitar dengan keamanan manusia dan keamanan nasional.²⁵ Sehingga, pada saat orang di negara maju telah berhasil menciptakan keamanan yang permanen dengan pendekatan baru, di era reformasi kita masih menggunakan pendekatan Orba yang mengandalkan pendekatan intelijen dan upaya represi, jauh dari pendekatan akademik.²⁶ Masalah laten penyebab konflik tidak diperhatikan, apalagi berusaha direspons dengan cepat, agar konflik baru tidak bermunculan.

Dapat dikatakan, faktor demografis atau pertumbuhan penduduk luput dari perhatian. Ilmuwan sosial seperti Malthus sejak lama telah mengingatkan bahaya pertumbuhan penduduk yang tidak proporsional dengan kemampuan manusia menyediakan bahan makanan yang terbatas pada masanya.²⁷ Lebih-lebih pemimpin politik seperti Hitler, sehingga ia memutuskan perlu agresi bagi tersedianya ruang untuk hidup (*Lebensraum*) yang dibutuhkan.²⁸ Demikian juga, para analisis keamanan kontemporer, seperti Buzan dan Terrif, khususnya, yang telah melihat hubungan faktor demografis dengan tingkat ancaman keamanan yang dapat ditimbulkannya, dalam analisis-analisis mereka.²⁹

Kini, siapapun yang datang ke Ambon dapat segera melihat dan merasakan semakin sempitnya kota ini akibat penghuninya yang kian padat. Dengan luas daratan 337 km persegi, hanya 17 persen yang dapat dihuni karena sebagian besar adalah wilayah tebing dan pegunungan. Itupun masih harus dibagi untuk jumlah penduduk Kota Ambon yang tahun 2010 mencapai 330 ribu jiwa, atau sekitar seperlima dari keseluruhan penduduk Provinsi Maluku, yang mencapai

²⁵ Lihat Buzan, 1991, *op.cit.*, dan Terrif et al, 2003, *op.cit.*

²⁶ Wawancara dengan Mahmud Haji Umar, Dosen FH, Universitas Khairun, Ternate, Provinsi Maluku Utara, di Ternate pada tanggal 16 Juli 2011; Wawancara dengan Abdul Kadir Bubu, Dosen FH Universitas Khairun, di Ternate, Provinsi Maluku Utra, pada 16 Juli 2011; Wawancara dengan Dr. Marwan, SE, MSi, Dosen FE Universitas Khairun, Ternate, Provinsi Maluku Utara, di Ternate pada tanggal 16 Juli 2011. Wawancara dengan Salmid Janidi, Dosen FH, Universitas Khairun, Ternate, Provinsi Maluku Utara, di Ternate pada tanggal 16 Juli 2011.

²⁷ Lihat Thomas Robert Malthus, dalam Geoffrey Gilbert (ed.) *An essay on the principle of population*, Oxford world's classics. Oxford University Press, 1999.

²⁸ Adolf Hitler, *Mein Kampf*, Trans. Ralph Meinheim, Boston: Houghton Mifflin, 1971: 643.

²⁹ Terry Terrif et al, *Securities Studies Today*, Cambridge: Poity Press, 2003.

1,53 juta jiwa.³⁰ Tingkat pertumbuhan penduduk cukup tinggi, sebesar 5,97 persen, dengan jumlah penduduk miskin mencapai 10.690 KK atau 44,744 jiwa tahun 2010, lebih seperdelapannya.³¹

Data statistik resmi mengenai perkembangan kependudukan di Kota Ambon yang dikeluarkan di bawah ini amat penting untuk diperhatikan, untuk diperbandingkan dengan kondisi kota/kabupaten lainnya di Provinsi Maluku, dan dilihat relevansinya dengan terciptanya kondisi yang sangat rawan menyulut konflik. Tabel 1 dan 2, misalnya, menunjukkan bahwa laju pertumbuhan penduduk dalam jumlah total manusia dan angka persentase. Kota Ambon mengalami angka kenaikan yang tinggi sejak dua dasawarsa lalu, apalagi dibandingkan dengan periode dasawarsa 1990-2000, yang angkanya minus 3 persen.³² Angka pertumbuhan pada rentang waktu 1990-2000 yang rendah itu, tidak aneh, karena pada periode panjang itu muncul kerusuhan sosial yang hebat di seluruh kota. Kerusuhan sosial, yang sesungguhnya sudah dapat dikategorikan sebagai *civil war* (perang saudara), karena berlangsung hebat dan cukup lama (2-3 tahun), baru kemudian mengalami peredaan. Tidak hanya menyebabkan minusnya angka kelahiran penduduk, konflik tersebut juga mengurangi jumlah penduduk secara total, akibat banyak yang menjadi korban tewas perang saudara.

Tabel 2. Pertumbuhan Jumlah Penduduk Tahun 2006-2009 (Satuan Jiwa)

Kabupaten/Kota	2006	2007	2008	2009
Maluku Tenggara Barat	161.343	162.636	93.621	94.370
Maluku Barat Daya	NA	NA	69.612	70.412
Maluku Tenggara	150.160	153.198	102.991	105.081
Maluku Tengah	355.548	398.136	368.874	370.931
B u r u	139.465	143.310	94.116	95.974
Buru Selatan	NA	NA	51.754	52.950
Kepulauan Aru	76.625	79.865	80.140	81.712
Seram Bagian Barat	158.175	158.619	158.937	159.718
Seram Bagian Timur	80.123	82.699	85.353	86.709
A m b o n	263.146	271.972	281.293	284.809
T u a l	NA	NA	53.323	54.404
Provinsi Maluku	1.383.585	1.420.433	1.440.014	1.457.070

Data diolah dari *Maluku dalam Angka 2010*.

Keterangan: NA: *Not Available*: data tidak ada.

³⁰ "Toleransi dari Maluku," *Business News*, 8268, 13 Juni 2012: 1.

³¹ Lihat "Pertumbuhan Penduduk Beban Kota Ambon," *Suara Maluku*, 22 September 2011: 12.

³² *Maluku dalam Angka 2010*, Pemkot Ambon, 2011: 56- 57.

Tetapi, yang penting untuk diperhatikan terkait dengan angka-angka mengenai Kota Ambon adalah laju perkembangan penduduk dalam periode pasca-konflik, atau setelah perang saudara usai, yang dalam hitungan untuk periode tersebut mengalami kenaikan sangat signifikan, mencapai 3,65 persen. Sementara untuk wilayah kabupaten lainnya di Provinsi Maluku, secara kontradiktif mengalami penurunan tajam, dari tidak minus menjadi minus. Di Kabupaten Maluku Tenggara, misalnya, angka penurunan laju pertumbuhan penduduk bahkan mencapai -5,00 persen, jauh melebihi 2 kabupaten lainnya, yakni Kabupaten Maluku Tenggara dan Kabupaten Maluku Tengah.³³ Jika dikalkulasi dalam periode dua dasawarsa yang sama, telah terjadi angka pertumbuhan ekstrim laju pertumbuhan penduduk untuk Kota Ambon dan penurunan drastis Kabupaten Maluku Tenggara dan Kabupaten Maluku Tengah, yang mencapai 5-6 persen. Angka dalam total jumlah jiwa, secara konsisten terus mengalami kenaikan dilihat dari angka-angka dalam beberapa tahun terakhir, hanya dilampaui Kabupaten Maluku Tengah, yang jauh lebih luas wilayahnya, sehingga angka kepadatan penduduknya juga jauh lebih sedikit dibandingkan dengan Kota Ambon.³⁴

Tabel 3. Laju Pertumbuhan Penduduk
dalam Persentase menurut Sensus dan Suspas³⁵

Kabupaten/Kota	1980-1990	1990-2000	2000-2009
Maluku Tenggara Barat	1,24	1,27	-5,00
Maluku Barat Daya	NA	NA	NA
Maluku Tenggara	1,98	2,07	-3,81
Maluku Tengah	2,72	0,63	-3,81
B u r u	4,10	2,59	-2,90
Buru Selatan	NA	NA	NA
Kepulauan Aru	NA	NA	NA
Searam Bagian Barat	NA	NA	NA
Seram Bagian Timur	NA	NA	NA
A m b o n	2,86	-3,00	3,65
T u a l	NA	NA	NA
Provinsi Maluku	2,58	0,37	2,18

Data diolah dari *Maluku dalam Angka 2010*.

Keterangan: NA: *Not Available*: data tidak ada.

Sementara itu, Tabel 3 menunjukkan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi untuk wilayah Kota Ambon dibandingkan wilayah-wilayah lainnya

³³ *Ibid.*

³⁴ Lihat kembali Tabel 1.

³⁵ *Ibid.*

di Provinsi Maluku. Tingkat kepadatan penduduk ini ditunjukkan dengan angka densitas, yaitu angka kepadatan penduduk menurut jumlah orang per km². Di Kota Amon, angka kepadatan penduduk yang tinggal untuk wilayah seluas 1 km² mencapai ratusan orang.³⁶ Angka ini terus mengalami kecenderungan kenaikan dalam periode satu dasawarsa (tahun 2000 - 2009). Sedangkan di wilayah-wilayah Provinsi Maluku lainnya justru angkanya baru mencapai puluhan, dan itupun ada yang mengalami angka penurunan, seperti di Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan Maluku Tenggara. Namun, jika dilihat dan diperbandingkan untuk keseluruhan Provinsi, Kabupaten Maluku Tenggara dan Kabupaten Maluku Tengah termasuk yang kedua lebih tinggi tingkat kepadatan penduduknya, walaupun dibandingkan dengan Kota Ambon termasuk jauh lebih rendah. Berangkat dari fakta tersebut sangat relevan hipotesis dari analisis tulisan ini bahwa kerusakan komunal/horizontal wajar relatif sering juga terjadi di kedua wilayah kabupaten tersebut.

Tabel 4. Kepadatan Penduduk per km²

Kabupaten/Kota	Luas-km ²	2000	2006	2007	2008	2009
Maluku Tenggara Barat	10.451,94	11	11	11	9	9
Maluku Barat Daya	4.581,06	NA	NA	NA	15	15
Maluku Tenggara	3.410,61	40	41	42	30	31
Maluku Tengah	11.595,57	29	31	32	32	32
B u r u	5.466,44	15	15	15	18	18
Buru Selatan	3.780,56	NA	NA	NA	12	14
Kepulauan Aru	6.269,00	NA	12	13	13	13
Seram Bagian Barat	4.046,35	NA	39	39	39	39
Seram Bagian Timur	3.952,08	NA	20	21	22	22
A m b o n	377,00	697	698	721	746	755
T u a l	254,39	NA	NA	NA	210	214
Provinsi Maluku	54.185,00	25	25	26	27	27

Data diolah dari *Maluku dalam Angka 2010*.

Keterangan: NA: *Not Available*: data tidak.

Sementara Tabel 4 di bawah,³⁷ secara lebih detil dan mendalam dapat dilihat tingkat kepadatan penduduk Kota Ambon dan hubungannya dengan persentase luas daerah dan persentase penduduk. Dari tabel tersebut, luas wilayah Kota Ambon yang hanya 377,00 km², yang terkecil setelah Tual (hanya selisih sedikit, sekitar 100 km² lebih), dan bila dibandingkan dengan wilayah kabupaten/kota lainnya di Provinsi Maluku selisihnya paling sedikit mencapai lebih dari 3 ribu

³⁶ *Ibid*: 59.

³⁷ Lihat Tabel 5, angka-angka dalam persentase.

km2.³⁸ Begitu pula, persentase luas wilayah dibandingkan dengan persentase jumlah penduduk yang mendiami wilayah itu, 0,70 persen, atau yang terkecil setelah Tual. Padahal, di wilayah-wilayah kabupaten/kota lainnya mencapai 19,29 persen, dan bahkan 21,40 persen, seperti yang diperlihatkan oleh angka-angka masing-masing untuk Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan Maluku Tengah.³⁹ Walaupun secara umum Provinsi Maluku, masih dikatakan sebagai wilayah di Indonesia Bagian Timur yang masih jarang penduduknya, tetapi untuk wilayah Kota Ambon, tingkat atau angka kepadatannya merupakan yang tertinggi, yakni mencapai 755 orang per km2.⁴⁰ Angka kepadatan penduduk (densitas) yang sangat tinggi ini sangat ekstrim perbedaannya jika dibandingkan dengan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, yang memiliki angka densitas terendah untuk seluruh wilayah Provinsi Maluku, yakni 9 penduduk untuk setiap km2.

Ini artinya, begitu sempit wilayah yang dapat ditinggali oleh penduduk Kota Ambon. Berdasarkan data Tabel 4 juga jelas tampak bahwa penghuni Kota Ambon merupakan salah satu wilayah di Provinsi Maluku yang memiliki jumlah paling sedikit rumah sendiri, hanya 67,16 persen. Artinya, sisanya, atau sebanyak hampir 30 persen, penduduk tetap Kota Ambon tidak punya tempat tinggal. Sedangkan tingkat kepemilikan rumah di kabupaten-kabupaten lainnya mencapai rata-rata di atas 70 persen, dan bahkan mendekati 90 persen.⁴¹ Data tersebut belum memperhitungkan tingkat kelaikan huni, kenyamanan kehidupan, dan tersedianya lahan (lain) untuk diusahakan, seperti untuk bersawah, berladang/berkebun, beternak, berburu binatang liar untuk dikonsumsi sehari-hari dan dijual sebagai penambah penghasilan, dan sebagainya, selain ditinggali untuk rumah.

Tabel 5. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Rumah Sendiri

Kabupaten/Kota	Rumah Milik Sendiri
Maluku Tenggara Barat	79,94
Maluku Tenggara	87,21
Maluku Tengah	77,49
B u r u	89,56
Kepulauan Aru	79,31
Seram Bagian Barat	83,59
Seram Bagian Timur	85,12
A m b o n	67,16
T u a l	81,38
Provinsi Maluku	78,71

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat –Susenas 2009.

³⁸ Maluku dalam Angka 2010, Pemkot Ambon, 2011, *op.cit.*: 58.

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ Lihat juga hal. 52, *ibid.*

⁴¹ Lihat Statistik Kesejahteraan Rakyat –Susenas 2009: 56.

Adapun angka-angka yang dipresentasikan dalam Tabel 5 mengenai Persentase Luas Daerah, Persentase Penduduk, dan Kepadatan Penduduk, untuk Kota Ambon, dalam kenyataannya, terus mengalami kenaikan, dari tahun ke tahun, sejak tahun 2006. Itu tentu saja berbeda dengan persentase luas wilayah dan persentase penduduk dan tingkat kepadatannya untuk Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Maluku Tenggara, Maluku Tengah, Buru, dan Seram Bagian Barat, yang dari tahun ke tahun, sejak tahun 2006, mengalami angka penurunan. Kota Ambon tidak jauh berbeda dengan wilayah pemukiman padat di Jakarta yang sering dilanda tawuran, seperti Matraman dan Pasar Rumpit. Orang tidak hanya sulit mencari pemukiman yang layak, tetapi juga untuk berjalan kaki. Sehingga, apa yang dikatakan oleh Gubernur Maluku, Karel Albert Ralahallu bahwa kunci penyelesaiannya ada di tangan warga Ambon atau Maluku sendiri,⁴² tidaklah tepat.

Tabel 6. Persentase Luas Daerah, Persentase Penduduk, dan Kepadatan Penduduk menurut Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota	Luas-km2	Persentase atas Luas	2006	2007	2008	2009
Maluku Tenggara Barat	10.451,94	19,29	11,65	11,45	6,50	6,48
Maluku Barat Daya	4.581,06	8,45	NA	NA	4,83	4,83
Maluku Tenggara	3.410,61	6,29	10,85	10,79	7,15	7,21
Maluku Tengah	11.595,57	21,40	25,68	25,91	25,62	25,46
B u r u	5.466,44	10,09	10,07	10,09	6,90	6,59
Buru Selatan	3.780,56	6,98	NA	NA	3,23	3,63
Kepulauan Aru	6.269,00	11,57	5,53	5,62	5,57	5,61
Seram Bagian Barat	4.046,35	7,47	11,42	11,17	11,04	10,96
Seram Bagian Timur	3.952,08	7,29	5,79	5,82	5,93	5,95
A m b o n	377,00	0,70	19,01	19,15	19,53	19,55
T u a l	254,39	0,47	NA	NA	3,70	3,73
Provinsi Maluku	54.185,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Data diolah dari *Maluku dalam Angka 2010*.

Keterangan: NA: *Not Available*: data tidak ada.

⁴² "Konflik Maluku Bisa Selesai oleh Orang Maluku Sendiri," *Suara Pembaruan*, 20 Pebruari 2012: 14.

B. Malfungsi Pembangunan

Mungkin orang lupa atau, menganggap sepele akan adanya laporan BPS yang mencatat Ambon sebagai wilayah termiskin ketiga di Indonesia.⁴³ Dengan densitas yang tinggi, tidak heran, kantong-kantong pemukiman dan sekaligus merupakan sentra-sentra perekonomian seperti Batu Merah dan Mardika, Tamaela, Talake, sekitar pasar, pusat-pusat ibadah dan pelabuhan, mudah berubah sewaktu-waktu menjadi medan perang. Kondisi ekonomi seperti ini tidak bisa diabaikan. Di banyak tempat, bahkan di negara maju, dengan banyak golongan miskin atau mereka yang tidak memiliki akses ke sumber daya dan hasil pembangunan, kerusakan mudah muncul. Kerusakan London, Birmingham, dan Los Angeles adalah contoh-contoh yang aktual untuk kerusakan komunal yang dilatarbelakangi kemiskinan, terciptanya *ghetto*, dan marginalisasi penduduk yang dibiarkan dalam jangka panjang. Di kota Ambon, banyak orang tidak memiliki pekerjaan formal. Di hari-hari kerja, pinggir-pinggir jalan dipenuhi orang yang duduk-duduk, bercanda, atau bermain kartu atau catur mengisi waktu. Kota ini makin sarat dengan tukang ojek dan kendaraan angkot yang menganggur, karena penggunaanya jauh lebih sedikit.

Jika dilihat untuk keseluruhan wilayah Provinsi Maluku, Kota Ambon memang bukan kota yang memiliki angka kemiskinan yang terendah, dalam angka-angka dengan skala 1:1000, yang diperbandingkan untuk tiga tahun, sejak 2007, 2008, dan 2009 (lihat Tabel 6).⁴⁴ Tetapi, jika dilihat untuk Kota Ambon itu sendiri, tampak jelas bahwa angka kemiskinan masih cukup tinggi, dengan kecenderungan selalu *double digit*, yaitu di atas 20 persen, dalam dua tahun terakhir yang diperbandingkan (2008 dan 2009). Sementara, Kabupaten Maluku Tengah dan Maluku Tenggara Barat adalah dua kabupaten yang tertinggi jumlah penduduk miskinnya. Itulah sebabnya, sejalan dengan penilaian awal penelitian ini, kemudian dapat ditemukan relevansi antara banyaknya jumlah penduduk yang miskin di Kabupaten Maluku Tengah dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat dengan konflik primordial yang sering juga muncul di sana, di luar yang rawan sewaktu-waktu pecah di Kota Ambon.

Jika dilihat secara lebih luas, Provinsi Maluku mengalami kemunduran yang signifikan dalam hal kesejahteraan penduduknya. Ini bisa dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (HDI) yang mengalami penurunan tajam dari ranking 5 secara nasional pada tahun 1999 menjadi 20 secara nasional pada tahun 2010.⁴⁵ Perkembangan yang kian buruk (kemerosotan) ini, dalam

⁴³ Lihat *Maluku dalam Angka 2010*, Pemkot Ambon, 2011, *op.cit*; *Statistik Kesejahteraan Rakyat –Susenas 2009*; “Toleransi dari Maluku,” *Business News*, 8268, 13 Juni 2012, hal. 1; dan “Pertumbuhan Penduduk Beban Kota Ambon,” *Suara Maluku*, 22 September 2011: 12.

⁴⁴ Lihat Tabel 6 dalam ribuan orang.

⁴⁵ “Toleransi dari Maluku,” *Business News*, 8268, 13 Juni 2012: 1.

kenyataannya, berjalan seiring dengan angka kemiskinan di wilayah ini yang terbilang sangat tinggi. Data BPS pada tahun 2011 mencatat jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan untuk wilayah provinsi ini mencapai 23 persen.⁴⁶ Bahkan, menurut data Susenas 2011, Provinsi Maluku, bersama-sama dengan Provinsi Papua, memiliki angka persentase kemiskinan tertinggi, yakni mencapai 25,25 persen. Sebagai perbandingan, angka persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan di Provinsi Maluku adalah empat kali lebih besar daripada Kalimantan yang mempunyai persentase terkecil, yaitu hanya 6,88 persen.⁴⁷ Yang lebih perlu diperhatikan dan penting hendak dikatakan di sini adalah bahwa Kota Ambon turut menyumbang pada munculnya angka persentase kemiskinan sebesar itu.

Tabel 7. Jumlah Penduduk Miskin Tahun 2007-2009 (000 jiwa)

Kabupaten/Kota	2007	2008	2009
Maluku Tenggara Barat	68,3	63,13	58,86
Maluku Barat Daya	NA	NA	NA
Maluku Tenggara	48,8	46,04	30,06
Maluku Tengah	118,7	108,37	101,76
B u r u	40,9	38,89	37,61
Buru Selatan	NA	NA	NA
Kepulauan Aru	25,9	29,78	28,50
Seram Bagian Barat	53,6	50,66	47,97
Seram Bagian Timur	31,8	30,79	29,29
A m b o n	16,8	21,18	21,13
T u a l	NA	NA	13,94
Provinsi Maluku	404,7	388,84	369,11

Sumber: Susenas

Data diolah dari *Maluku dalam Angka 2010*.

Keterangan: NA: *Not Available*: data tidak ada.

Selanjutnya, masih terkait dengan upaya menjelaskan hubungan antara kondisi kemiskinan dan rawannya konflik sosial, konflik primordial atau horizontal muncul di masyarakat, Tabel 7 mempresentasikan data-data tingkat garis kemiskinan di kota dan desa dan juga angka-angka persentasenya.⁴⁸ Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa ukuran standar kemiskinan yang dipakai

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ Lihat *Maluku dalam Angka 2010*, Pemkot Ambon, 2011, *op.cit.*

untuk Kota Ambon, sebagai konsekuensinya, jauh lebih tinggi, dari yang dipergunakan untuk mengukur kemiskinan di wilayah pedesaan. Tingkat inflasi dan penghasilan (Upah Minimum Regional) yang berbeda tentu saja yang melatarbelakangi perbedaan yang mencolok itu. Kondisi tersebut menyumbang besar pada penghitungan garis kemiskinan secara total untuk seluruh wilayah Provinsi Maluku, yang seharusnya semakin tinggi ukuran penghitungan garis kemiskinannya dalam penghasilan (belanja) Rupiah. Sejalan dengan itu, walaupun angka kemiskinan penduduk di wilayah perkotaan adalah setengahnya dari jumlah penduduk yang tinggal di wilayah pedesaan di seluruh wilayah Provinsi Maluku (dalam persentase), dan juga angka tersebut cenderung turun dalam tiga tahun terakhir (2007-2009), tetapi, dilihat secara lebih komprehensif, angka persentase kemiskinan sebesar dua digit (*double digit*), tetap merupakan angka atau persentase yang cukup tinggi. Supaya analisis ini bisa realistis, diperlukan angka-angka yang bersumber dari Susenas Panel inipun harus diasumsikan sudah relatif benar, dan tidak mengandung manipulasi, sebagaimana data-data dari BPS Pusat (Jakarta) mengenai perkembangan angka kemiskinan yang pernah digunakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan diragukan beberapa waktu lalu.

Tabel 8. Statistik Kemiskinan Provinsi Maluku Tahun 2007-2009

Kabupaten/Kota	2007	2008	2009
Garis Kemiskinan (Rp):			
Kota	205.046	213.969	230.913
Desa	170.547	180.087	199.596
Total	179.552	188.931	207.771
Persentase Penduduk Miskin:			
Kota	14,49	12,97	11,03
Desa	37,02	35,56	34,30
Total	31,14	29,66	28,23

Sumber: Susenas Panel.

Malfungsi atau kegagalan program pembangunan di Kota Ambon menyebabkan terjadinya dan meluasnya penyebaran kemiskinan, mengingat tidak banyak penduduknya yang memiliki lapangan kerja. Tingginya tingkat pengangguran di kota tersebut terlihat dari data tahun 2009, yaitu sekitar hampir 200 ribu penduduk berusia 15 tahun ke atas tanpa lapangan kerja (dari 330 ribu jiwa pada tahun 2010 dari jumlah keseluruhan penduduk Kota Ambon), atau hanya sekitar seratus ribu lebih sedikit, dalam kategori umur

yang sama, yang memiliki lapangan kerja.⁴⁹ Angka pengangguran yang tinggi ini tidak hanya akibat baru terkena PHK, melainkan karena faktor iklim (perkembangan) ekonomi yang semakin buruk dan kebijakan pembangunan yang keliru sehingga menyebabkan banyak di antara mereka yang tidak bisa terserap dalam pasar kerja pembangunan. Masalah minimnya serapan lapangan kerja di Kota Ambon diakui oleh Wakil Walikota Ambon, Sam Latuconsina dalam penjelasan di surat kabar kota baru-baru ini.⁵⁰ Sekolah-sekolah tinggi cukup banyak tersedia di kota tersebut, namun penyerapan pasar kerja tidak sebesar jumlah lulusannya, karena tekanan eksplosif (ledakan) jumlah penduduk yang jauh lebih tinggi ketimbang lapangan kerja (baru) yang bisa ditawarkan. Hal ini belum mempertimbangkan adanya kekeliruan dalam membangun sekolah dan jurusan yang ada, tanpa memperhatikan hubungannya dengan *link and match* dengan lapangan kerja yang tersedia setiap tahun. Sedangkan selama ini, seperti yang ada dalam catatan terakhir data statistik lokal, Pemkot Ambon hanya mampu menyalurkan tenaga kerja ke luar negeri hanya untuk sebanyak 26 orang.⁵¹

Malfungsi pembangunan juga mengakibatkan penduduk berpenghasilan tidak sesuai dengan tingkat kebutuhan standar minimal, atau jauh lebih rendah, untuk hidup layak di perkotaan, apalagi untuk Kota Ambon, yang selalu lebih tinggi daripada di wilayah perdesaan. Sebagai konsekuensinya, mereka yang berpenghasilan tidak memadai itu, kemudian masuk dikategorikan sebagai golongan penduduk miskin. Malfungsi pembangunan juga mengakibatkan tidak adanya kebijakan perbaikan kesejahteraan hidup penduduk pada umumnya. Dalam hal ini, tidak adanya kebijakan pembangunan perumahan yang murah (bersubsidi) dari Pemkot Ambon untuk masyarakat kebanyakan (bawah), membuat mereka hidup di permukiman yang tidak layak, seperti mereka yang menempati kios-kios sepanjang tepi laut, kawasan pantai atau Pasar Mardika, dan di lorong-lorong permukiman yang padat, kotor, tidak baik sanitasinya serta sumpek.

Tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi di Kota Ambon dan penyebarannya yang tidak merata di seluruh wilayah Provinsi Maluku, yang cenderung memusat di Kota Ambon akibat dorongan urbanisasi, sementara daya dukung kota yang terbatas, telah membuat penduduk merambah wilayah-wilayah yang seharusnya tidak untuk ditinggali, namun harus dijaga bagi kelestarian lingkungan.⁵² Akibatnya, mulai sering muncul bencana alam

⁴⁹ Dari "Survey Angkatan Kerja Nasional," *ibid*: 68.

⁵⁰ "Pertumbuhan Penduduk Bebas Kota Ambon," *Suara Maluku*, 22 September 2011: 12, *loc.cit*.

⁵¹ *Maluku dalam Angka 2010*, Pemkot Ambon, 2011, *op.cit*: 54.

⁵² Lihat, "235 Warga Ambon Harus Direlokasi," *Suara Pembaruan*, 5 September 2012: 14.

tanah longsor dan banjir bandang (tiba-tiba) di Kota Ambon, yang memakan korban jiwa.⁵³ Semua ini telah disebabkan oleh degradasi lingkungan yang semula merupakan kawasan hutan, yang kian dipercepat kerusakannya oleh pembangunan hotel-hotel dan bangunan tembok baru yang tidak terkontrol. Oleh karenanya, tanggung jawab pemerintah kota terkait penyusunan dan pengimplementasian Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah (RTRW) patut dipertanyakan. Tanpa perencanaan kota yang baik dan pengimplementasiannya yang konsisten, penduduk Kota Ambon pada umumnya, apalagi yang jauh dari fasilitas, tidak hanya semakin hidup dalam kondisi *stress* yang tinggi, namun juga, sangat terancam kehidupannya sehari-hari akibat degradasi lingkungan yang semakin luas dan cepat, sebagaimana yang terjadi dalam kasus tanah longsor dan banjir bandang beberapa waktu lalu.

Demikian pula untuk pelayanan publik. Kegagalan pembangunan, atau kebijakan dan program-programnya yang tidak berorientasi pada rakyat banyak, seperti pembangunan rumah sakit yang mahal untuk kalangan yang mampu, dan absennya program jaminan kesehatan masyarakat untuk yang tidak mampu di lain pihak, membuat hidup semakin tidak nyaman bagi penduduk Kota Ambon pada umumnya. Begitu pula dengan kondisi ketersediaan air bersih yang terbatas bagi mereka, yang kurang memperoleh perhatian pemerintah, karena isu ini tidak seksi dibandingkan dengan isu pemilihan umum kepala daerah (pemilukada), pemilihan gubernur (pilgub), pilkot (pemilihan Wali Kota) dan sejenisnya, tingkat kerawanan keamanan insani (*human security*) mereka semakin tinggi. Malfungsi pembangunan dapat dilihat dari masih tingginya angka kematian bayi di bawah umur satu tahun, yang pada tahun 2010 mencapai 35 bayi atau 7 per 1000 kelahiran, atau lebih rendah dari angka nasional, yang 40 per 1000 kelahiran. Juga, untuk angka kematian balita tahun 2010, walaupun tercatat 55 balita, lebih rendah dari tingkat nasional yang mencapai 58 per 1000 kelahiran, tetapi kondisi ini tetap tidak memadai untuk ukuran kesejahteraan penduduk secara menyeluruh di suatu wilayah.⁵⁴

Pertumbuhan kota yang tidak terarah dan *development malfunction* yang mengakibatkan banyaknya orang tersingkir telah menciptakan penduduk dengan kehidupan *stress* yang tinggi. Dengan sungai-sungai yang mulai kering airnya, dan kali-kali yang dipenuhi sampah, belakangan laut menjadi pula sasaran tempat pembuangan sampah domestik, serta banyak lubang menganga di jalan, dan trotoar yang rusak, kota Ambon tidak lagi membuat nyaman dan aman

⁵³ Lihat "Banjir Bandang Ambon Tewaskan 130 Jiwa," *TribunNews.com*, 9 Agustus 2012, diakses pada 27 Agustus 2012.

⁵⁴ "Pertumbuhan Penduduk Bebani Kota Ambon," *Suara Maluku*, 22 September 2011: 12, *loc.cit.*

penduduknya. Serbuan angkot dan motor yang bising di jalan menciptakan ancaman keamanan manusia yang semakin tinggi.

Dengan kondisi seperti ini, Kota Ambon ibarat “tumpukan rumput dan ilalang kering” yang rawan dari perciksan api. Dengan kata lain, konflik mudah muncul kapan saja, tinggal menunggu faktor pemicunya. Adapun faktor pemicu konflik horizontal bisa saja berbeda. Di negara maju dibutuhkan pemicu yang logis, yakni tindakan kepolisian yang memihak, sehingga memuncakkan perasaan ketidakadilan yang dirasakan sejak lama. Untuk kota Ambon, cukup provokator yang tidak jelas asal-usulnya dan *rumour* yang dapat membuat seisi kota dan kepulauan itu benar-benar lumpuh, seperti dalam konflik lebih dari satu dasawarsa lalu.

C. Faktor Segregasi

Segregasi wilayah permukiman yang diwariskan sejak jaman penjajahan Belanda dan dipertahankan pasca-konflik (Perjanjian Malino) memperjelas garis perbedaan yang ada.⁵⁵ Kawasan Kudamati (yang sarat dengan tudingan kawasan kaum separatis Republik Maluku Selatan (RMS), Trikora, belakang Gereja Silo, dan Gunung Nona merupakan wilayah-wilayah di Kota Ambon yang sering menjadi asal mula wilayah konflik tidak lain merupakan kawasan padat penduduk dan mayoritas beragama Kristen. Sedangkan sekitar pelabuhan, Talake, Tamaela, Batu Gantung, Mardika, Batu Merah, dan kawasan Mesjid An-Nur dan Al-Fatah merupakan kantong-kantong permukiman penduduk Muslim, yang bercampur dengan pendatang, para pekerja migran dan eks transmigran asal Pulau Jawa, Madura, Sulawesi Selatan, dan NTB. Pasca-konflik 11 September 2011 lalu, saling curiga antar-kelompok tidak cepat sirna, sehingga benteng karung-karung pasir dan pos-pos jaga masih berdiri. Fungsinya untuk pertahanan dan sekaligus mengawasi orang luar yang masuk, sehingga orang yang non-penduduk wilayah itu tidak berani bertandang, walau masih bersaudara.

Pemerintah Daerah (Pemda), parpol, politisi di Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) dan aparat keamanan tahu kondisi ini, tetapi tidak pernah mengoreksi kondisi ini. Mereka sibuk dengan kepentingannya masing-masing. Malfungsi demokrasi, KKN, dan *bad governance* menghambat sirkulasi elit dan mobilitas politik. Sehingga, birokrasi pemda tidak banyak berubah dan terkoreksi komposisi pegawainya. Menjadi pegawai negeri dengan kepastian masa depan yang menjadi impian penduduk lokal tidak dapat dipenuhi

⁵⁵ Wawancara dengan Kombes Nasan Hutahaen, Direktur Intelkam, Harianto Kabag Analisa Direktorat Intelkam, dan perwira intel Direktorat Intelkam Polda Maluku pada 20 September 2011 di Ambon; Wawancara dengan Kol. Nazaruddin, Danrem 151/Binaia, Provinsi Maluku pada 23 September 2011 di Ambon.

semua golongan. Minimnya anggaran pembangunan tidak dapat mendorong pembukaan lapangan kerja baru, apalagi berjangka panjang yang memberi kepastian. Tidak heran, dengan mentalitas warisan Belanda, masyarakat juga terkotak-kotak dalam pilihan lapangan kerja. Kalangan pendatang asal BBM (Buton, Bugis, Makasar), Padang, dan Madura mendominasi sektor informal, terutama angkutan kota, termasuk ojek dan becak. Mereka juga kebanyakan membuka warung makan, atau bekerja sebagai tukang bakso atau soto keliling, tukang cukur dan penjual jamu. Sedangkan penduduk lokal kebanyakan memelihara pilihan kerja di sektor formal.

Terkait dengan segregasi dalam lapangan kerja, dapat dilihat data pendukung berikut ini,⁵⁶ yang menjelaskan bahwa bersama-sama dengan Kabupaten Maluku Tengah, komposisi penduduk Kota Ambon mendominasi jumlah mereka yang berstatus sebagai pegawai negeri atau bekerja di sektor pemerintahan, di seluruh wilayah Provinsi Maluku. Dalam hal ini tercatat sebanyak 6.833 PNS di Kota Ambon yang berasal dari Golongan I, II, III, dan IV, dengan mayoritas berlatar belakang pendidikan SLTP dan SLTA, sementara di Kabupaten Maluku Tengah sebanyak 8.191 PNS.⁵⁷ Seperti dapat dilihat dari tabel di bawah ini, perbedaan jumlah PNS Kota Ambon, dan juga Kabupaten Maluku Tengah itu, cukup mencolok. Padahal, di sektor pemerintahan inilah terjadi kompetisi primordial yang tinggi dalam penerimaan PNS, namun tidak sehat, karena proses perekrutannya dominan diwarnai praktik KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme), yang tanpa intervensi kebijakan pusat yang netral dan adil, akan berlanjut sebagai salah satu benih subur penyebab bersemayanya konflik horizontal. Karena dengan berbagai praktik KKN dalam proses rekrutmen, politik identitas, yang sebagaimana diargumentasikan pengamat sosial, Imam B. Prasodjo, kian rawan memicu konflik primordial,⁵⁸ semakin menguat di birokrasi pemerintahan kota.

Di masa sebelumnya, dalam periode 1998-2001, konflik horizontal berlatar belakang agama yang muncul di Kota Ambon, yang kemudian menyebar ke hampir seluruh wilayah Provinsi Maluku, diwarnai pula oleh kompetisi yang tidak sehat antara dua pemeluk agama yang berbeda yakni Kristen dan Islam di sektor birokrasi. Lebih jelasnya, persaingan yang tidak sehat untuk menguasai birokrasi pemerintahan antara PNS yang Kristen dan Muslim, turut berkontribusi pada munculnya eskalasi ketegangan di masyarakat dan dalam politik lokal, yang berujung pada konflik primordial. Perkembangan politik nasional (di Pusat) yang semakin sektarian di penghujung kekuasaan

⁵⁶ Lihat Tabel 9.

⁵⁷ *Maluku dalam Angka 2010*, Pemkot Ambon, 2011, *op.cit.*: 98.

⁵⁸ "Politik Identitas Picu Konflik," *Kompas*, 2 Desember 2011: 2.

pemerintah Orba Soeharto, dengan pengaruh ICMI yang besar terhadap birokrasi pemerintahan, memicu memanasnya suhu politik dan ketegangan antar-komunitas agama besar di Kota Ambon, apalagi mengingat posisi PNS yang memiliki jangkauan dan sangat memegang peranan di masyarakat sampai daerah terpencil. Pengkotak-kotakan dalam masyarakat tampak jelas dalam tubuh birokrasi pemerintahan pada masa sebelum pecahnya perang saudara pada dasawarsa lalu.

Sementara. pada masa sekarang, kondisi dan komposisi pegawai sektor pemerintahan belum banyak berubah, karena kebijakan reformasi birokrasi yang telah dicanangkan secara nasional belum ditindaklanjuti secara benar-benar di lapangan. Secara realistis, kompetisi tidak sehat untuk bisa mendominasi birokrasi pemerintahan kota terus berlangsung. Padahal seharusnya, upaya pemetaan baru terhadap kondisi dan komposisi PNS di Kota Ambon serta langkah koreksinya segera sudah dilakukan pasca-konflik lalu. Karena itu, birokrasi pemerintahan Kota Ambon yang seharusnya dapat menjadi salah satu pilar dan mesin persatuan nasional, tidak dapat diandalkan dan bekerja, dan malah menjadi bagian dari masalah, yang diakui atau tidak, berdampak ke luar, yang menimbulkan *spill-over effect*.

Tabel 9. Jumlah PNS di Provinsi Maluku Tahun 2008

Pemda/Pemkot	Golongan I	Golongan II	Golongan III	Golongan IV	Jumlah
Provinsi Maluku	78	1.482	2.667	270	4.497
Kabupaten Maluku Barat Daya	NA	NA	NA	NA	NA
Kabupaten Maluku Tenggara Barat	53	1.338	2.334	490	4.215
Kabupaten Maluku Tenggara	52	1.383	2.201	426	4.062
Kabupaten Kepulauan Aru	11	452	498	74	1.035
Kabupaten Maluku Tengah	219	2.858	4.567	547	8.191
Kabupaten Buru	93	1.241	1.241	145	2.761
Kabupaten Buru Selatan	NA	NA	NA	NA	NA
Kabupaten SBB	56	989	1.491	193	2.729
Kabupaten SBT	27	362	428	49	866
Kota Ambon	100	4.019	4.019	1.379	6.833

Kota Tual	NA	NA	NA	NA	NA
Total Provinsi Maluku	689	11.481	19.446	3.573	35.189

Sumber: Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kota Ambon

Data diolah dari *Maluku dalam Angka 2010*.

Keterangan: NA: *Not Available*: data tidak ada

Segregasi penduduk di Kota Ambon pun terlihat semakin tinggi. terkait masalah transmigrasi dan migrasi penduduk. Kebijakan transmigrasi dan migrasi yang semula diharapkan dapat meningkatkan produktifitas daerah dan memperkuat integrasi dan keamanan nasional, malahan justru berakibat sebaliknya. Hal ini karena tidak dilakukan dengan benar implementasinya di lapangan, ataupun sudah keliru sejak penyusunan kebijakannya di pusat (kementerian terkait). Pembauran tidak terjadi, karena kelompok transmigran asal Pulau Jawa (Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan NTB), yang pada umumnya Muslim, didatangkan ke Provinsi Maluku, terutama di wilayah yang tidak banyak penduduknya, sehingga para transmigran tersebut tinggal dan menjalani kehidupan sehari-hari lebih banyak dalam kelompok mereka. Tabel 9 berikut ini menjelaskan latar belakang transmigran dan wilayah penempatan mereka di Provinsi Maluku.⁵⁹

Tabel 10. Asal dan Wilayah Penempatan Transmigran di Provinsi Maluku

Tahun	KK	Jiwa	Daerah Asal	Lokasi Penempatan
2005	500	2.221	Lokasi/Penempatan Pengungsi	Kab. Maluku Tengah, Kab. Maluku Tenggara, Kab. Buru, Kota Ambon
2006	100	402	Lokasi/Penempatan Pengungsi	Kab. Maluku Tengah: 98 KK Kab. Buru: 2 KK
2007	200	76	Jabar, Jatim, TPB	Kab. Seram Bagian Timur: 200 KK Kab. Pulau Buru Seti Bakti Kab. Seram Bagian Timur: 250 KK
	105	733	Kramat	
	100 216	415 755	Jatim, TPS Jabar, Jatim, NTB Banten, TPS	
2008	610	2.444	Jatim, Jabar, NTB, Banten, TPS	250 KK (Jatim, Jabar, NTB, Banten, TPS)
2009	200	812	Banten, Jabar, Jateng, Jatim, TPS	Bengoi, Airmatakabo

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku

Data diolah dari *Maluku dalam Angka 2010*.

⁵⁹ *Maluku dalam Angka 2010*, Pemkot Ambon, 2011, *ibid*: 67.

Tidak mendukungnya kondisi di wilayah transmigrasi ataupun kegiatan para transmigran untuk menunjang kehidupan mereka, yang mengharuskan mereka berhubungan dengan wilayah lainnya di Provinsi Maluku yang maju, terutama Kota Ambon, membuat mereka memiliki mobilitas tinggi. Namun, tanpa didukung intervensi kebijakan pusat yang tepat, apalagi jika perkembangan politik di pusat berkembang tidak konstruktif, interaksi tersebut tidak menciptakan pembauran masyarakat secara alami. Penduduk asli Kota Ambon yang Kristen tidak mudah membaur dengan kaum pendatang (transmigran) yang memiliki perbedaan agama tersebut. Walaupun ada pembauran, itu mudah berlangsung antara transmigran dan kaum pekerja pendatang (migran-perantau) dengan penduduk setempat (lokal) yang berlatar belakang agama yang sama, yaitu Muslim dengan Muslim, dan Kristen dengan Kristen, di mayoritas lokasi pemukiman mereka masing-masing. Sehingga, kondisi ini memperbanyak dan memperkuat segregasi penduduk berdasarkan tempat tinggal (permukiman) yang sudah tercipta sebelumnya.

Faktor segregasi tempat tinggal dan lapangan kerja yang telah tercipta itu diperkuat oleh rasio jenis kelamin (*sex ratio*), baik dari hasil Sensus Penduduk 1971-2000) dan 2001-(sensus 2010 terbaru?) dan Proyeksi Penduduk, yang menunjukkan bahwa jumlah total penduduk laki-laki lebih banyak daripada jumlah total penduduk perempuan di Kota Ambon.⁶⁰ Dalam hubungannya dengan masalah gender, analisis konflik kontemporer melihat relevansi masalah gender dengan kecenderungan munculnya dan sulitnya memadamkan konflik. Komposisi jumlah penduduk dan pengambilan keputusan yang didominasi oleh kaum laki-laki juga dinilai telah memberikan pengaruh atas pengambilan keputusan atas perang dan mempersulit upaya meredam konflik, mengingat kondisi fisik dan psikologis lingkungan laki-laki yang berbeda daripada perempuan, yang dinilai jauh lebih lembut, dan lebih mengedepankan pendekatan yang lebih lunak serta menghindari tindak kekerasan.

Faktor segregasi permukiman dan lapangan kerja penduduk selanjutnya diperkuat oleh komposisi latar belakang pendidikan penduduk Kota Ambon yang tidak baik, yang didominasi oleh penduduk tamatan SMA/SLTA, yaitu sebanyak 6.660 orang (44,61 persen). Sedangkan lulusan universitas hanya mencapai 4.116 orang (27,57 persen).⁶¹ Ini artinya, sikap dalam merespons munculnya dan mencari solusi konflik yang rasional masih bisa lebih dipengaruhi faktor emosi daripada rasio, yang memberi peluang lebih besar bagi para provokator untuk menjalankan aksi-aksinya dalam menyulut konflik.

⁶⁰ Lihat kembali, *ibid*: 52.

⁶¹ *Ibid*: 53.

Kebiasaan masyarakat antara kedua kelompok masyarakat yang berbeda, Muslim dan Kristen, yang jumlah populasinya seimbang besarnya telah memperburuk situasi. Aksi memacu sepeda motor dengan kecepatan tinggi dan kebut-kebutan dengan knalpot dibuka, arak-arakan penguburan yang panjang dan mengganggu lalu-lintas, serta budaya minum minuman keras tradisional (sopi) rawan dimanfaatkan provokator.⁶² Tanpa menyadari semua bahaya laten ini, tokoh agama dan aparat keamanan pun sulit mencegah umatnya untuk tidak terjerumus konflik. Demikian juga, spanduk-spanduk ajakan *baku bae* (saling berbaikan atau bersikap damai satu dengan lainnya) di berbagai sudut jalan tidak dapat bekerja efektif. Sehingga, kini pertanyaannya, sampai berapa lama tentara dan polisi, termasuk pasukan organik dari luar Maluku, harus berjaga 24 jam⁶³ mencegah konflik baru di daerah penyangga pemukiman kedua komunitas yang berbeda? Dengan banyak bahaya laten yang tidak diatasi pasca-Perjanjian Malino, konflik besar baru tinggal menunggu waktu saja, walau banyak rumah ibadah, kantor kepolisian dan militer berdiri di sana-sini. Penyulutnya sudah disadari bersama, walaupun selama ini tidak pernah tertangkap, yaitu provokator, yang cukup bermodalkan berbagai macam rumor untuk dapat menimbulkan sebuah konflik besar baru.

V. Kesimpulan dan Rekomendasi

Solusi konflik permanen di Kota Ambon harus memperhatikan faktor pertumbuhan penduduk dan distribusi hasil pembangunan, selain pembuatan tata ruang yang baik. Sudah saatnya pembuat kebijakan memperhatikan faktor demografis sebagai salah satu penyebab konflik dan penghancur stabilitas di suatu wilayah. Faktor demografi, pertumbuhan penduduk, penyebaran dan densitasnya, serta segregasi yang tercipta harus segera dikoreksi keadaannya. Ini artinya, kebijakan yang ketat atas pertumbuhan penduduk harus segera diimplementasikan dengan sungguh-sungguh. Sedangkan segregasi penduduk Kota Ambon yang telah berlangsung secara sengaja karena warisan kebijakan masa lalu ataupun tidak, harus segera diakhiri.

Dengan demikian, solusi konflik horizontal atau primordial di Kota Ambon tidak dapat diserahkan begitu saja pada warga Kota Ambon, seperti yang sebelumnya diutarakan oleh Gubernur Maluku, Karel Albert Ralahallu,⁶⁴

⁶² Wawancara dengan Kombes Nasan Hutahaen, Direktur Intelkam, Harianto Kabag Analisa Direktorat Intelkam, dan perwira intel Direktorat Intelkam Polda Maluku pada 20 September 2011 di Ambon; Wawancara dengan Kol. Nazaruddin, Danrem 151/Binaiya, Provinsi Maluku pada 23 September 2011 di Ambon.

⁶³ Wawancara dengan Kol. Nazaruddin, Danrem 151/Binaiya, Provinsi Maluku pada 23 September 2011 di Ambon.

⁶⁴ "Konflik Maluku Bisa Selesai oleh Orang Maluku Sendiri," *Suara Pembaruan*, 20 Pebruari 2012: 14, *loc.cit.*

karena penyebabnya sudah disediakan oleh kondisi domestik yang ada. Pernyataan gubernur tersebut terkesan adanya niatan untuk cuci tangan atau lepas dari tanggung jawab. Sebab, Pemerintah Kota Ambon sebenarnya bisa berperan dengan kebijakannya untuk melakukan intervensi untuk mencegah dan menghentikan konflik horizontal lebih jauh, dengan cara mengendalikan pertumbuhan penduduk dan mengeliminasi kebijakan yang menciptakan segregasi penduduk, dengan selalu memperhatikan keseimbangan jumlah dan penyebaran penduduk, mobilitas, interaksi, dan transformasinya, serta bersikap adil dalam mengintroduksi dan menerapkan berbagai kebijakannya.

Upaya pemetaan baru terhadap kondisi dan komposisi PNS di Kota Ambon serta langkah koreksinya seharusnya sudah segera dilakukan pasca-konflik sosial besar satu dasawarsa lalu, sebelum konflik-konflik primordial baru bermunculan. Jelasnya, reformasi birokrasi, terutama dalam cara perekrutan PNS, untuk mengakhiri praktek KKN dan politik sektarianisme harus dijalankan benar-benar. Sebab, walaupun pengaruh ICMI sudah jauh berkurang, namun pengaruh politik sektarian di pusat selalu memberikan pengaruh pada perkembangan politik lokal Kota Ambon, dan Provinsi Maluku secara menyeluruh.

Perbaiki situasi Kota Ambon secara fundamental untuk mencegah berulangnya konflik-konflik sosial baru juga mau tidak mau melibatkan kebijakan Pemerintah Provinsi Maluku. Karena, hal ini menyangkut upaya mempercepat (penyebaran) pembangunan di wilayah-wilayah kabupaten dan kota lainnya di provinsi tersebut untuk mengurangi beban, daya tampung dan kemampuan Kota Ambon dalam mengatasi masalah kemiskinan dan keterbelakangan di berbagai wilayah pinggiran provinsi. Melalui kombinasi solusi demografis dan pembangunan yang tepat dan egaliter bagi semua golongan, masalah Kota Ambon dapat dikurangi, yang akan membuatnya memiliki ketahanan terhadap berbagai aksi dari dalam dan luar yang mencoba memprovokasi munculnya konflik-konflik horizontal baru di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

Adolf Hitler. *Mein Kampf*, Trans. Ralph Meinheim, Boston: Houghton Mifflin, 1971: 643.

Aditjondro, George Junus. "Notes on the Jihad forces in Maluku." July 2000. [Http://www.angelfire.com/rock/hotburrito/laskar/aditjondro500.html](http://www.angelfire.com/rock/hotburrito/laskar/aditjondro500.html), diakses pada 5 Mei 2010.

"Ambon kembali membara, darah kembali tumpah di Desa Pelauw," *arrahmah.com*, 11 Februari 2012, diakses pada 27 Agustus 2012.

Andi Muh. Darlis, *Konflik Komunal: Studi dan Rekonsiliasi Konflik Poso*, Yogyakarta: Buku Litera, 2012.

"Banjir Bandang Ambon Tewaskan 130 Jiwa," *TribunNews.com*, 9 Agustus 2012, diakses pada 27 Agustus 2012.

Buzan, Barry. *People, State, and Fear*. Sussex: Wheatsheaf, 1983.

Buzan, Barry dan Lene Hansen, *The Evolution of International Security Studies*, New York: Cambridge University Press, 2009.

Barry Buzan, Ole Waever, dan Jaap de Wilde, *Security: A New Framework for Analysis*, London: Lynne Rienner, 1998.

Chaider S. Bamualim (Eds.), *Communal Conflicts in Contemporary Indonesia*, Jakarta: UIN, KAS, 2002.

"Darurat Sipil di Maluku, Lalu Apa." *Majalah Tempo*, 9 July 2000.

Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi: Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

"Enam Wakil Laskar Jihad Bertemu Presiden." *Harian Kompas*, 7 April 2000.

FitzRoy, Felix R dan Elissaios Papyrakis. *An Introduction to Climate Change, Economics and Policy*. UK: Earthscan, 2010.

Friedman, Thomas L. *Hot, Flat, and Crowded*, Jakarta: Gramedia, 2009.

- Galpin, Richard. "Army Accused over Moluccas Conflict." *BBC News*, July 17, 2000.
- Gupta, Joyeeta. *The Climate Change Convention and Developing Countries: From Conflict to Consensus*, Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 2007.
- Homer-Dixon, Thomas F. *Environment, Scarcity, and Violence*. Princeton, New Jersey, Princeton University Press, 1999.
- Homer-Dixon, Thomas F. dan Jessica Blitt. *Evidence: Links Among Environment, Population, and Scarcity*. New York: Rowman and Littlefield, 1991.
- Holsti, KJ. *The State, War, and the State of War*. UK: Cambridge University Press, 1996.
- "Indonesia: Overcoming Murder and Chaos in Maluku." *ICG Asia Report*, No. 10, December 19, 2000.
- Kameyama, Yasuko et al (eds.), *Climate Change in Asia: Perspective on the Future Climate Regime*, New York: UN University, 2008.
- "Kekerasan Horizontal di Indonesia," *Kompas*, 2 Desember 2011.
- "Kerusuhan: Ambon rusuh saat peringatan Pattimura," *Bisnis.jabar.com*, 15 Mei 2012, diakses pada 27 Agustus 2012.
- "Konflik Maluku Bisa Selesai oleh Orang Maluku Sendiri," *Suara Pembaruan*, 20 Pebruari 2012: 14.
- "Korban Meninggal Akibat Pertikaian di Galela Diperkirakan Ratusan Jiwa," *Antara*, 31 Mei 2000, Muslims News World Online.
- Maluku dalam Angka 2010*, Pemkot Ambon, 2011.
- Malut Post*, 19 Juli 2011.
- Mimbar Malut*, 16 Juli 2011.
- "Pemuda Dianiaya, Kota Ambon Memanas," *Papua Barat Pos*, 19 Nopmeber 2011: 7.
- "Penembakan Misterius Picu Bentrokan Susulan," *Kompas*, 8 Maret 2012: 22
- Ratnawati, Tri. *Maluku dalam Catatan Seorang Peneliti*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.

McBeth, John and Dini Djalal. "Tragic Island: Ambon Violence May Have Had Its Origins in Jakarta." *Far Eastern Economic Review*, March 25, 1999.

Noorhaidi. *Laskar Jihad, Islam, Militancy and the Quest for Identity in Post New Order Indonesia*. Utrecht: Universiteit Utrecht, 2005. <https://openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/1887/13369/1/Dissertation+Noorhaidi.pdf>, was accessed on May 5, 2010.

Pemkot Minta Amankan Sekolah, Pasar, dan Terminal," *Suara Maluku*, 22 September 2011: 12.

"Pertumbuhan Penduduk Bebani Kota Ambon," *Suara Maluku*, 22 September 2011: 12.

"Politik Identitas Picu Konflik," *Kompas*, 2 Desember 2011: 2.

"RMS Menyelundupkan Amunisi," 27 Juli 2000, MHI, <http://jannah.itgo.com/ambon/22-30%20juli%202000htm>, diakses pada 7 Oktober 2011.

"Setelah Ambon Mana Lagi." *Panji Masyarakat*, February 3, 1999.

Stephen Hoadley and Juergen Rueland (eds), *Asian Security Reassessed*, Singapore: ISEAS 2006.

Terry Terrif et al, *Securities Studies Today*, Cambridge: Poity Press, 2003.

Thomas Robert Malthus, dalam Geoffrey Gilbert (ed.) *An essay on the principle of population*, Oxford world's classics. Oxford University Press, 1999.

Tirtosudarmo, Riwanto. "Economic Development, Migration, and Ethnic Conflict: A Preliminary Observation," *Sojourn*, No. 2, 1997.

"Toleransi dari Maluku," *Business News*, 8268, 13 Juni 2012, hal. 1.

"235 Warga Ambon Harus Direlokasi," *Suara Pembaruan*, 5 Septemebr 2012: 14.

Wawancara

Wawancara dengan Sekda Kota Ternate, Isnain Ibrahim, di Ternate, pada 15 Juli 2011.

Wawancara dengan Abdul Kadir Bubu, Dosen FH Universitas Khairun, di Ternate, Provinsi Maluku Utara, pada 16 Juli 2011.

Wawancara dengan Mahmud Haji Umar, Dosen FH, Universitas Khairun, Ternate, Provinsi Maluku Utara, di Ternate pada tanggal 16 Juli 2011.

Wawancara dengan Dr. Marwan, SE, Msi, Dosen FE Universitas Khairun, Ternate, Provinsi Maluku Utara, di Ternate pada tanggal 16 Juli 2011.

Wawancara dengan Salmid Janidi, Dosen FH, Universitas Khairun, Ternate, Provinsi Maluku Utara, di Ternate pada tanggal 16 Juli 2011.

Wawancara dengan Kombes Nasan Hutahaen, Direktur Intelkam, Harianto Kabag Analisa Direktorat Intelkam, dan perwira intel Direktorat Intelkam Polda Maluku pada 20 September 2011 di Ambon.

Wawancara dengan Kol. Nazaruddin, Danrem 151/Binaiya, Provinsi Maluku pada 23 September 2011 di Ambon.

